

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017

Erna Haryanti Koestedjo

haryanti_erna@yahoo.com

Dosen Program Studi Agribisnis

Fakultas Pertanian

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ABSTRAK

Judul penelitian strategi penanggulangan kemiskinan daerah. Tujuan penelitian (1) mengetahui kondisi dan karakteristik kemiskinan di Kabupaten Gresik; (2) mengetahui determinan-determinan kemiskinan di Kabupaten Gresik; dan (3) merumuskan strategi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Metode penelitian mengacu pada (1) Panduan Penanggulangan Kemiskinan Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah, yang diterbitkan oleh TNP2K tahun 2011; (2) Pedoman Penyusunan SPKD, yang diterbitkan Tim Sekretariat Pembina TKPK Provinsi dan Kota/Kabupaten Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri tahun 2011; (3) Petunjuk Teknis Penyusunan SPKD - Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah, yang diterbitkan oleh TNP2K tahun 2014.

Hasil penelitian, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gresik tahun 2016 adalah sebesar 167.120 jiwa (13,19%) dari jumlah penduduk di Kabupaten Gresik pada tahun yang sama. Kondisi persentase ke-miskinan ini lebih tinggi bila dibanding dengan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur (11,85%) maupun capaian secara Nasional (10,70%). Determinan kemiskinan kabupaten Gresik tidak meratanya akses terhadap pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, tidak terpenuhinya akses terhadap infrastruktur dasar dan akses terhadap aset produktif, ketahanan pangan dan rendahnya tingkat investasi swasta dan kewirausahaan.

Strategi penanggulangan kemiskinan kabupaten Gresik (1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; (2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; (4) mengembangkan inovasi program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan; (5) penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mewujudkan sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Kata Kunci: Strategi, Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Latar Belakang.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait dan mempengaruhi satu dengan lainnya (*inter locking*), dan angka-angka kemiskinanpun telah menjadi salah satu masalah yang kritis dan krusial yang dihadapi setiap bangsa dan pemerintahan. Kemiskinan tidak lagi dipandang hanya sebagai persoalan kemanusiaan dan ekonomi belaka, persoalan kemiskinan dengan berbagai dimensinya telah disadari akan dapat berdampak *destruktif* yang bermuara pada terjadinya instabilitas sosial, ekonomi, keamanan, hukum maupun politik. Bahkan, tak

jarang mempengaruhi eksistensi dan resistensi sebuah pemerintahan baik dalam skala lokal, regional, maupun nasional bahkan internasional.

Dalam menghadapi persoalan kemiskinan di Indonesia, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang salah satu isinya adalah penyempurnaan TKPK menjadi TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) yang langsung diketuai oleh Wakil Presiden. Peraturan Presiden tersebut di tindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa secara struktur langsung diketuai oleh Wakil Gubernur di tingkat Provinsi dan Wakil Bupati/Wakil Walikota di tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah. Langkah-langkah tersebut merupakan langkah awal di samping langkah-langkah berikutnya berupa penerbitan panduan-panduan dan pelatihan-pelatihan kepada Daerah (TKPK Provinsi maupun Kabupaten/ Kota) sebagai upaya penanganan dan pendekatan penanggulangan kemiskinan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh.

Kabupaten Gresik dalam menghadapi persoalan-persoalan kemiskinan telah menunjukkan capaian yang signifikan, salah satunya adalah capaian perkembangan persentase penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan nasional yang menunjukkan *trend* menurun sejak tahun 2003, dimana pada tahun 2003 tercatat sebesar 23,20 persen dan pada tahun 2016 turun menjadi 13,19 persen. Meskipun mengalami penurunan, capaian ini masih berada di atas target tujuan pembangunan nasional (RPJMN) yang menetapkan angka capaian minimal 8-10 persen.

Adapun Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kondisi dan karakteristik kemiskinan di Kabupaten Gresik;
2. Mengetahui determinan-determinan kemiskinan di Kabupaten Gresik; dan
3. Merumuskan strategi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik

TINJAUAN PUSTAKA

Pemetaan program:

Pemetaan program penanggulangan kemiskinan dilakukan untuk melihat program-program penanggulangan kemiskinan yang sifatnya afirmatif yang sudah dijalankan di daerah, baik program nasional maupun program daerah sendiri. Program penanggulangan kemiskinan yang afirmatif artinya program-program yang secara khusus dirancang dan dijalankan untuk menjawab persoalan kemiskinan secara langsung kepada sasaran penduduk miskin secara individu, keluarga maupun rumah tangga, sasaran melalui komunitasnya maupun sasaran melalui sumber penghidupannya.

Dalam pendekatan percepatan penanggulangan kemiskinan nasional, program-program dengan sasaran individu, keluarga dan rumah tangga miskin dikelompokkan sebagai program klaster 1, biasanya berupa program perlindungan sosial. Program-program yang sasaran-nya komunitas dengan model pemberdayaan dikelompokkan sebagai klaster 2, seperti berbagai macam program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM). Selanjutnya program yang sasarannya sumber penghidupan yang dimaksudkan untuk penanggulangan kemiskinan adalah program yang bertujuan mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil (UMK), seperti sektor-sektor informal yang menjadi sumber penghidupan masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi terbawah, program-program ini dikelompokkan dalam klaster 3, kegiatannya berupa

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gresik, Tahun 2017

(Erna Haryanti)

peningkatan kapasitas usaha dan peningkatan aksesibilitas terhadap modal dan jaringan usaha bagi UMK.

Pemetaan program juga dilakukan menurut bidang/sector untuk melihat ketidaksesuaian dan kekosongan-kekosongan dalam upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dari kebijakan yang selama ini dijalankan, baik berupa program dan kegiatan, anggaran maupun regulasi. Kaji ulang dilakukan berdasarkan bidang atau sector sesuai dengan 5 (lima) sector dalam analisis kemiskinan, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur (prasarana) dasar, bidang ketenagakerjaan dan kewirausahaan, serta bidang ketahanan pangan.



METODOLOGI.

Metodologi penyusunan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Gresik, mengacu pada:

- (1) Panduan Penanggulangan Kemiskinan Buku Pegangan Resmi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPD), yang diterbitkan oleh TNP2K tahun 2011;
- (2) Pedoman Penyusunan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang diterbitkan Tim Sekretariat Pembina TKPK Provinsi dan Kota/Kabupaten Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Dalam Negeri tahun 2011;
- (3) Petunjuk Teknis Penyusunan SPKD - Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah, yang diterbitkan oleh TNP2K tahun 2014; dan
- (4) Modul-modul lembar kerja penyusunan SPKD.

ANALISIS KEMISKINAN

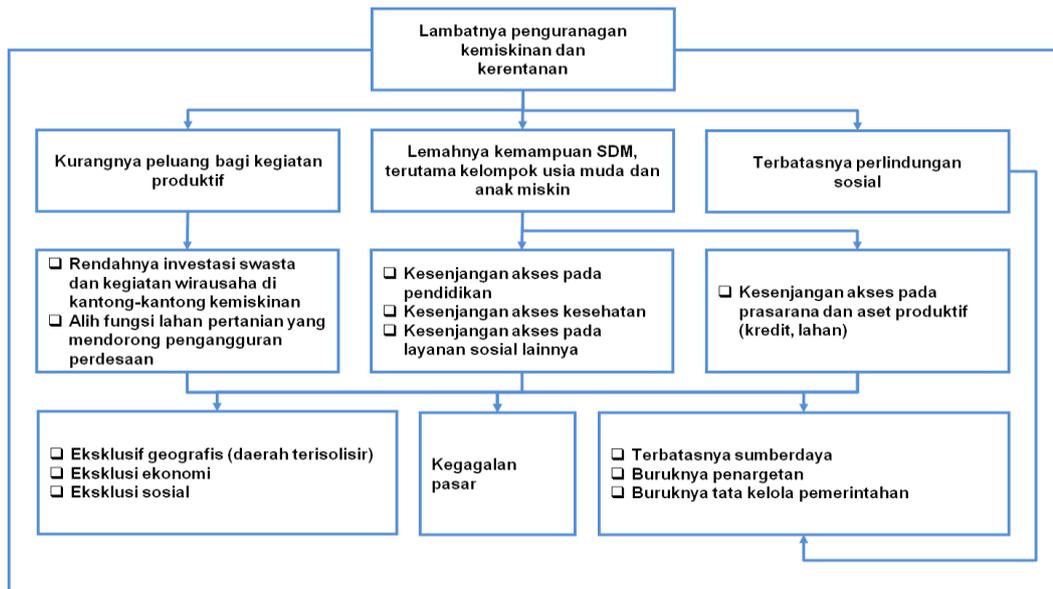
Kondisi Umum Kemiskinan Kab. Gresik

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Kabupaten Gresik tahun 2016 adalah sebesar 167.120 jiwa atau sekitar 13,19 persen¹⁾ dari jumlah penduduk di Kabupaten Gresik pada tahun yang sama. Kondisi persentase ke-miskinan ini lebih tinggi bila dibanding dengan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur maupun capaian secara Nasional, dimana persentase kemiskinan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 adalah sebesar 11,85 persen sedangkan capaian Nasional adalah 10,70 persen.

Diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin) di Kabupaten Gresik pada tahun 2016 menempati urutan ke 25 (dua puluh lima) dari yang terendah.

Determinan Kemiskinan Kab. Gresik

Determinan kemiskinan daerah menjelaskan tentang cara menemukan akar masalah yang dihadapi pada setiap bidang. Determinan kemiskinan secara umum memiliki keterkaitan dengan tidak meratanya akses terhadap pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Selain itu determinan kemiskinan juga terkait dengan tidak terpenuhinya akses terhadap infrastruktur dasar dan akses terhadap aset produktif, ketahanan pangan dan rendahnya tingkat investasi swasta dan kewirausahaan.



Gambar 1
Determinan Kemiskinan secara Umum

Analisis APBD Untuk Penanggulangan Kemiskinan

Secara sederhana, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang berpihak pada penanggulangan kemiskinan disusun berdasarkan strategi dan prioritas yang telah ditentukan untuk penanggulangan kemiskinan serta standar pelayanan public.

Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 telah menggarisbawahi empat strategi pokok penanggulangan kemiskinan, yaitu (i) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, (ii) meningkatkan pendapatan dan kemampuan masyarakat miskin, (iii) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, serta (iv) memperkuat sinergi kebijakan. Berdasarkan strategi ini, untuk berpihak pada penanggulangan kemiskinan APBD perlu memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Anggaran pendapatan harus tidak menambah beban pengeluaran masyarakat miskin.
- Anggaran belanja harus mendukung pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin; peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; pengembangan dan keberlanjutan UMK; serta penguatan sinergi kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Alokasi belanja dalam APBD diharapkan mengacu kepada prioritas-prioritas tersebut, sehingga *fokus* dan *lokus* intervensi melalui program dan kegiatan yang dianggarkan sesuai dengan kebutuhan penyelesaian masalah.

Gambaran Umum APBD Kab. Gresik.

Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APD) Kabupaten Gresik selama tahun 2014-2016 menurut realisasi pendapatan dan belanja daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2,
Realisasi APBD Kabupaten Gresik
menurut Pendapatan dan Belanja tahun 2014-2016
(dalam juta Rupiah)

KOMPONEN	TAHUN: 2014		TAHUN: 2015		TAHUN: 2016	
	Realisasi (Rp)	Selisih (%)	Realisasi (Rp)	Selisih (%)	Realisasi (Rp)	Selisih (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pendapatan	2.206.389,32	1,56	2.436.173,61	-3,82	2.522.076,19	-1,20
Belanja	2.172.823,82		2.529.213,28		2.552.245,21	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Gresik – data diolah

Berdasar tabel di atas nampak bahwa, perkembangan realisasi pendapatan daerah tahun 2016 lebih baik dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam APBD adalah sebesar Rp. 2.436.173.610.000,00 sementara itu untuk realisasi pendapatan daerah tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.522.076.193.169,16. Hal ini berarti terjadi peningkatan realisasi pendapatan sebesar 3,41 persen atau sebesar Rp. 85.902.583.169,16. Peningkatan realisasi pendapatan ternyata juga diikuti dengan peningkatan realisasi belanja. Realisasi belanja daerah Kabupaten Gresik tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.552.245.208.369,15 meningkat (lebih besar) sekitar 0,90 persen dari realisasi belanja daerah tahun 2015 yang sebesar Rp. 2.529.213.280.000,00. Dari data pada tabel 9, dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 terjadi surplus pendapatan masing-masing sebesar 1,56 persen, sementara itu pada tahun 2015 dan 2016 terjadi defisit realisasi anggaran pendapatan terhadap realisasi anggaran pendapatan terhadap belanja masing-masing sebesar -3,82 persen dan -1,20 persen.

Isu Strategis Kebijakan dan Kelembagaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Kebijakan dan Kelembagaan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sangat dibutuhkan untuk memperkuat gerakan penanggulangan kemiskinan. Isu-isu strategis terkait kebijakan dan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

- (1) Memperkuat pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan yang berupa peraturan, baik berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup), dan aturan pelaksanaannya yang secara jelas mencantumkan kemiskinan sebagai isu utama-nya, misalnya Perda tentang penanggulangan kemiskinan, peraturan pemanfaatan dana bansos dalam penanggulangan kemiskinan, peraturan yang mewajibkan OPD yang memiliki program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk memanfaatkan Basis Data Terpadu (BDT) 2015 sebagai dasar acuan perencanaan program penanggulangan kemiskinan;
- (2) memperkuat Sekretariat TKPK dengan menyediakan peralatan dan personil kesekretariatan yang mumpuni dalam mengelola data-data kemiskinan menjadi informasi yang up to date;
- (3) melakukan pengembangan program khusus penanggulangan kemiskinan yang merupakan inovasi daerah sebagai program tersendiri dengan alokasi anggaran

(Erna Haryanti)

tersendiri, untuk memudahkan dalam monitoring dan evaluasi oleh TKPK Kabupaten Gresik. Program khusus ini harus dilengkapi dengan pedoman teknis pelaksanaan program, memiliki pendamping khusus program; dan memanfaatkan BDT 2015 untuk penerima manfaat program.

- (4) meningkatkan keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan pe-mangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan, seperti pelaku CSR (*corporate social responsibility*), Perguruan Tinggi, LSM, dan Media Massa melalui kemitraan dalam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Strategis dan Kebijakan Penang gulangan Kemiskinan.

(1) Strategi Penanggulangan Kemiskinan;

Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah (Provinsi maupun Kabupaten), dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan.

Untuk menunjang penang gulangan kemiskinan yang komprehensif sekaligus sebagai tindak lanjut dari strategi tingkat nasional, maka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik dalam rangka pemenuhan kebutuhan hak dasar masyarakat secara berkeadilan tanpa perbedaan diupayakan dengan strategi utama:

- mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
- mengembangkan inovasi program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan;
- penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mewujudkan sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

(2) Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan;

a. Kebijakan pemenuhan hak atas layanan pendidikan:

- Memperluas akses pendidikan untuk semua kalangan masyarakat untuk pencapaian Wajar Dikdas 9 tahun dengan biaya terjangkau (gratis);
- Peningkatan kualitas hasil pendidikan;
- Peningkatan kualitas tenaga pendidik;
- Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah (pendidikan);
- Meningkatkan layanan perpustakaan.

b. Kebijakan pemenuhan hak atas layanan kesehatan:

- Memperluas akses kesehatan untuk semua kalangan ma-syarakat dengan biaya terjangkau (gratis);
- Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan beserta tenaga kesehatan;
- Pengembangan RSUD melalui pola BLUD.

c. Kebijakan pemenuhan hak atas pekerjaan dan berusaha:

- Meningkatkan kesempatan kerja serta mendorong mobilitas tenaga kerja pada sektor ekonomi berbasis lokal;
- Meningkatkan upaya perlindungan ketenagakerjaan;

- Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pemberdayaan masyarakat dan balai latihan kerja (BLK);
 - Mengembangkan sektor industri kecil, menengah dan kreatif;
 - Penguatan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kompetensi dan daya saing usaha koperasi dan UMKM.
- d. Kebijakan pemenuhan hak atas pangan:
- Peningkatan ketersediaan pangan dan gizi masyarakat yang berkelanjutan;
 - Peningkatan kompetensi tenaga penyuluh pertanian;
 - Penganekaragaman produksi pangan;
 - Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang;
 - Peningkatan perlindungan konsumen.
- e. Kebijakan pemenuhan hak atas perumahan:
- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan dan pedesaan;
 - Pengembangan lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat;
 - Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rumah dan sanitasi yang sehat.
- f. Kebijakan pemenuhan hak atas air bersih:
- Peningkatan perlindungan terhadap sumberdaya air dan jaminan akses masyarakat miskin ke air bersih dan sanitasi;
 - Peningkatan peran serta lembaga dan organisasi masyarakat lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya air;
 - Peningkatan pengetahuan warga miskin mengenai pengelolaan sumberdaya air dan sanitasi layak;
 - Pengembangan mekanisme penyediaan air bersih bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin yang tinggal di wilayah rawan air.
- g. Kebijakan pemenuhan hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup:
- Peningkatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta terkendalinya pelanggaran penambangan liar (pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/ perusakan lingkungan);
 - Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestariannya;
 - Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau;
 - Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan energi yang berwawasan lingkungan;
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi serta pengelolaan dan konservasi sumber daya air;
 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem drainase dan saluran pembuang.
- h. Kebijakan pemenuhan hak atas keadilan dan kesetaraan gender:
- Penguatan kelembagaan organisasi wanita/penguatan peran wanita dalam pembangunan;
 - Peningkatan peran serta gender dalam pembangunan desa;
 - Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak;

- Pemantapan program KB;
- Meningkatkan keluarga sejahtera.

(3) Rancangan Program Penanggulangan Kemiskinan;

Rancangan program penanggulangan kemiskinan (rencana aksi) merupakan serangkaian indikasi-indikasi program yang dapat dijadikan landasan Perangkat Pemerintah Daerah dalam menyusun kegiatan di dalam Renstra, Renja dan RKPD dalam rangka mencapai target kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik.

Prasyarat Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.

A. Penanganan Akar Penyebab Kemiskinan dengan Membangun Moralita Menanggulangi Kemiskinan;

Pemahaman tentang penyebab dan akar penyebab kemiskinan sebagai-mana diuraikan pada bagian akhir analisis akar masalah (pada Bab 4) seharusnya menyadarkan pelaku penanggulangan kemiskinan bahwa pendekatan dan cara yang di pilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu ke arah perubahan cara pandang utamanya para pelaku penanggulangan kemiskinan untuk bukan hanya mengambil keputusan atas dasar hukum dan bukan hanya bertindak atas dasar kewajiban, tetapi juga senantiasa mengambil keputusan dan bertindak berlandaskan pada nilai-nilai luhur universal, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan pilar-pilar pembangunan berkelanjutan.

Tentu hal ini bukan pekerjaan yang mudah, karena perubahan cara pandang dalam penanggulangan kemiskinan seperti ini pada dasarnya terkait erat dengan proses perubahan mental, sikap/perilaku masing-masing individu (persoalan individual) para pelaku penanggulangan kemiskinan. Meski demikian, hal itu bukanlah tidak mungkin, bukankah setiap manusia, meski secuil, memiliki kebaikan hati, kepedulian, kerelawanan.

Oleh karena itu proses membangun kesadaran kritis melalui pembelajaran sikap/perilaku dan memulihkan mental melalui pemberdayaan moral dalam penanggulangan kemiskinan perlu ditumbuhkan secara terus menerus.

Perubahan mental, sikap/ perilaku dan cara pandang para pelaku penanggulangan kemiskinan akan menjadi pondasi bagi terbangunnya kelembagaan (institusi) penanggulangan kemiskinan yang lebih kokoh serta mampu mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal yang lebih berorientasi ke masyarakat miskin serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

B. Unifikasi Data Kemiskinan Daerah melalui Pemutahiran Data Kemiskinan dan Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Data Kemiskinan Daerah (SIM-DKD),

Salah satu tantangan utama yang akan dihadapi dalam menjalankan strategi dan program penanggulangan kemiskinan adalah berkaitan dengan penentuan “siapa” dan “dimana” (fokus dan lokus) penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan serta “bagaimana” (modus) program penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan akan benar-benar menyentuh faktor penyebab bahkan akar masalah kemiskinan itu sendiri.

Data kemiskinan daerah (DKD) yang telah dimiliki dan dimutakhirkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dimungkinkan telah ber-basiskan nama dan alamat (*by name by address*) dan posisinya pada kondisi kesejahteraan dalam rumah tangga maupun sebagai individu, sehingga memungkinkan untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi akan “fokus” dan “lokus” penerima manfaat program. Akan tetapi data yang telah tersedia tersebut kemungkinan belum dapat memberikan informasi tentang penyebab kemiskinannya, karena informasi tentang kondisi kesejahteraan hanyalah merupakan *symptom* (gejala) dari kondisi kemiskinannya. Disamping itu, untuk memperoleh informasi yang bukan sekedar daftar nama, alamat dan masalah, tetapi lebih jauh sebagai data untuk memperoleh informasi “siapa yang lebih miskin/prioritas dibandingkan yang lainnya”, maka data yang tersedia perlu disusun sebagai *wealth ranking poverty*.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui TKPK selaku tim Koordinasi dan pengendali pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gresik, akan:

- Memanfaatkan basis data kemiskinan daerah (data dasar kemiskinan *by name by address*), dengan terlebih dahulu melengkapi dengan data dan informasi penyebab kemiskinan;
- Mengembangkan matriks *wealth ranking poverty* terhadap data (dasar) kemiskinan daerah;
- Memanfaatkan data tersebut sebagai dasar acuan dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi oleh seluruh Perangkat Daerah maupun pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan.

Secara operasional, pengendalian unifikasi data kemiskinan menjadi bagian dari tugas Tim Teknis TKPK (Sekretariat TKPK) dan teknis pelaksanaannya berada pada fungsi Kelompok Kerja (Pokja) Pendataan dan Informasi.

C. Pengelompokan Program Penanggulangan Kemiskinan:

Guna mempermudah koordinasi, sinergi dan sinkronisasi, serta pengendalian, khususnya ketepatan sasaran (penerima manfaat) dan tujuannya, maka (berdasarkan Permendagri Nomor 42 Tahun 2010) program-program penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan dikelompokkan menjadi:

(i) Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga (Cluster 1)

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus pemenuhan hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial adalah bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. Ciri lain dari kelompok program ini adalah mekanisme pelaksanaan kegiatan yang bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin.

Cakupan program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial di titik beratkan pada pemenuhan hak dasar utama. Hak dasar utama tersebut mem-prioritaskan pada pemenuhan hak atas pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, serta air bersih dan sanitasi.

Penerima manfaat pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial ditujukan pada kelompok masyarakat sangat miskin. Hal ini disebabkan bukan hanya karena kondisi masyarakat sangat miskin yang bersifat rentan, akan tetapi juga karena mereka belum mampu mengupayakan dan memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Pengendalian kelompok program ini dipimpin oleh Assisten Sekda Bidang Kesra bersama Kepala Dinas Sosial. OPD yang mengusul-kan/mengajukan program/kegiatan yang bersifat bantuan sosial dan disetujui, secara otomatis menjadi anggota kelompok program ini. OPD yang Meskipun tidak mengusulkan akan tetapi men-dapat tugas pembantuan dalam pengendalian pelaksanaan program bersifat bantuan sosial dari Pemerintah Pusat maupun Propinsi, juga secara otomatis menjadi anggota kelompok program ini. Kelompok masyarakat peduli, dunia usaha dan stakeholder's lainnya yang *consent* terhadap penanggulangan kemiskinan melalui bantuan sosial dapat bergabung/diajak bergabung menjadi anggota kelompok program ini.

(ii) Kelompok Program Penang gulungan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Cluster 2)

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan mem-berikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. Pendekatan pemberdayaan dimaksud-kan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya.

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah tahap lanjut dalam proses penanggu-lation kemiskinan. Pada tahap ini, masyarakat miskin mulai menyadari kemampuan dan potensi yang dimilikinya untuk keluar dari kemiskinan. Pendekatan pemberdayaan sebagai instrumen dari program ini dimaksudkan tidak hanya melakukan penyadaran terhadap masyarakat miskin tentang potensi dan sumberdaya yang dimiliki, akan tetapi juga men-dorong masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam skala yang lebih luas terutama dalam proses pembangunan di daerah.

Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah:

a. Menggunakan pendekatan partisipatif;

Pendekatan partisipatif tidak hanya tentang keikutsertaan masya-rakat dalam pelaksanaan program, tetapi juga keterlibatan masya-rakat dalam setiap tahapan pelaksanaan pro-gram, meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan pelaksanaan program, bahkan sampai tahapan proses pelestarian dari program tersebut.

b. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat;

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberda-yaan masyarakat menitik beratkan pada penguatan aspek kelem-bagaan masyarakat guna

(Erna Haryanti)

meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, sehingga masyarakat mampu secara mandiri untuk pengembangan pembangunan yang diinginkannya. Penguatan kapasitas kelembagaan tidak hanya pada tahap pengorganisasian masyarakat untuk mendapatkan hak dasarnya, akan tetapi juga memperkuat fungsi kelembagaan sosial masyarakat yang diguna-kan dalam penanggulangan kemiskinan.

c. Pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan ber-kelompok;

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pember-dayaan masyarakat harus menumbuhkan kepercayaan pada ma-syarakat miskin untuk selalu membuka kesem-patan masyarakat dalam berswakelola dan berkelompok, dengan mengembangkan potensi yang ada pada mereka sendiri guna mendorong potensi mereka untuk berkembang secara mandiri.

d. Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;

Perencanaan program dilakukan secara terbuka dengan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat dan hasilnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat desa/ kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Proses ini membutuhkan Koordinasi dalam melakukan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan program yang jelas antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan tersebut.

Cakupan program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan:

- a. Wilayah, kelompok berbasis pemberdayaan masyarakat dilakukan pada wilayah perdesaan, wilayah perkotaan, serta wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah tertinggal.
- b. Sektor, kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat menitik beratkan pada penguatan kapasitas masyarakat miskin dengan mengembangkan berbagai skema program berdasarkan sektor tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat di suatu wilayah.

Penerima manfaat dari kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin (termasuk sangat miskin). Kelompok masyarakat miskin tersebut adalah yang masih mempunyai kemampuan untuk menggunakan potensi yang dimilikinya walaupun terdapat keterbatasan.

Pengendalian kelompok program ini dipimpin oleh Kepala BPMPD bersama Kepala Dinas PU. Perangkat Daerah yang mengusulkan/ mengajukan program/kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat dan disetujui, secara otomatis menjadi anggota kelompok program ini. Perangkat Daerah yang meskipun tidak mengusulkan akan tetapi men-dapat tugas pembantuan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi, juga secara otomatis menjadi anggota kelompok program ini. Kelompok masyarakat peduli, dunia usaha dan stakeholder's lainnya yang *consent* terhadap pemberdayaan masyarakat dapat bergabung/di ajak bergabung untuk menjadi anggota kelompok program ini.

(iii) Kelompok Program Penang gulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil (Cluster 3)

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan adalah

memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan mening-katkan kualitas hidupnya. Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah:

a. Memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro;

Kelompok program ini merupakan pengembangan dari ke-lompok program berbasis pemberdayaan masyarakat yang lebih mandiri, dalam pengertian bahwa pemerintah memberikan kemudahan kepada pengusaha mikro dan kecil untuk mendapatkan kemudahan tambahan modal melalui lembaga keuangan/perbankan yang dijamin oleh Pemerintah.

b. Memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar;

Memberikan akses yang luas dalam berusaha serta melakukan penetrasi dan perluasan pasar, baik untuk tingkat domestik maupun internasional, terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil. Akses yang dimaksud dalam ciri ini tidak hanya ketersediaan dukungan dan saluran untuk berusaha, akan tetapi juga kemudahan dalam berusaha.

c. Meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha;

Memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan manajemen berusaha kepada pelaku-pelaku usaha kecil dan mikro.

Cakupan program kelompok program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil dapat dibagi atas 3 (tiga), yaitu: (1) pembiayaan atau bantuan permodalan; (2) pembukaan akses pada permodalan maupun pemasaran produk; dan (3) pendampingan dan peningkatan keterampilan dan manajemen usaha.

Penerima manfaat dari kelompok program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil. Penerima manfaat pada kelompok program ini juga dapat ditujukan pada masyarakat miskin yang belum mempunyai usaha atau terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Pengendalian kelompok program ini dipimpin oleh Assisten Sekda Bidang Ekbang bersama Kepala Dinas Koperasi dan UKM. OPD-OPD yang mengusulkan/mengajukan program/kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat berbasis usaha ekonomi mikro dan kecil dan disetujui, secara otomatis menjadi anggota kelompok program ini. OPD yang meskipun tidak mengusulkan akan tetapi mendapat tugas pembantuan dalam pengendalian pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis usaha ekonomi mikro dan kecil dari Pemerintah Pusat maupun Propinsi, juga secara otomatis menjadi anggota kelompok program ini. Kelompok masyarakat peduli, dunia usaha dan stakeholder's lainnya yang *consent* terhadap hal ini dapat bergabung/diajak bergabung untuk menjadi anggota kelompok program ini.

(iv) Kelompok Program Penang gulangan Kemiskinan Lainnya.(Cluster 4)

Kelompok program ini dapat dibentuk sesuai kebutuhan daerah. Program-program penanggulangan kemiskinan selain program yang telah dikelompokkan dalam klaster 1, 2, dan klaster 3 dikelompokkan dalam kelompok program ini.

Pengendalian kelompok program ini dipimpin oleh Assisten Sekda Bidang Pemerintahan bersama Kepala Dinas Nakertrans.

KESIMPULAN

1. Pemerintah Kabupaten Gresik telah menyusun rumusan kebijakan tersebut dalam dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Diharapkan dokumen SPKD dapat menjadi salah satu cara yang tepat dan terarah dari Pemerintah Daerah dalam menjalankan peran penanggulangan kemiskinan di daerah.
2. SPKD Kabupaten Gresik ini menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder pembangunan di Kabupaten Gresik dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Gresik. Oleh karena itu SPKD perlu diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dalam rencana jangka menengah yaitu RPJM-D dan Renstra SKPD maupun dalam jangka pendek (tahunan) yaitu dalam RKPD ataupun dalam Renja OPD pada periode yang akan datang.
3. Seluruh pemangku kepentingan perlu merespon SPKD ini dengan melakukan hal yang sama untuk menjamin sinergitas dan implementasi serta pencapaian target penurunan angka kemiskinan sesuai dengan kewenangannya. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan juga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dalam koridor kewenangan dan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2013, Profil Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia, Jakarta.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2013, Riset Kesehatan Dasar – Riskesdas2013, Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik, 2011, Definisi Operasional Indikator MDG's, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2011, Ensiklopedia Indikator Ekonomi dan Sosial, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2012, Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2011 Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2012, Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur – Agustus 2011, Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2013, Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2012 Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2013, Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur – Agustus 2012, Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2014, Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2013 Provinsi Jawa Timur, Surabaya.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gresik, Tahun 2017

(Erna Haryanti)

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2014, Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur – Agustus 2013, Surabaya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2015, Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2014 Provinsi Jawa Timur, Surabaya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2015, Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur – Agustus 2014, Surabaya.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2015, Kabupaten Gresik Dalam Angka Tahun 2015, Gresik.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2015, Statistik Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015, Gresik.